

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Adnan, H. (2020). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 151-171.
- Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Terjemahan oleh A. Abdul Wahab Khallaf. Kairo: Dar al-Hadith, 1997.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah*. Terjemahan oleh A. Rahman Saleh. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. Terjemahan oleh Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Litera AntarNusa, 2006.
- Andi Siti Sri Hutami. 2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 10, Nomor 1, Januari 2017 (10-19)
- Anggraini, P. K. (2015). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 35592.
- Ardiansyah, R., & Hidayat, M. T. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 5(2), 107-115.
- Army Yulida, Ryzki Puspita. (2020). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kesesuaian Kebutuhan Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, Vol 2, No 1.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141-160.
- Budiasa, I. M. (2016). Paradigma dan Teori dalam Etnografi Baru dan Etnografi Kritis. In *Prosiding Seminar Nasional Paradigma Dan Teori-Teori Komunikasi Dalam Ilmu Komunikasi* (Vol. 1, pp. 9-24).
- Buku Pintar Dana Desa. (2019). Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.*
- Djumadi, D. (2017). KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI PERSPEKTIF ISLAM. *TAHKIM*, 12(1).
- Fukuyama, F. (2016). Governance: What do we know, and how do we know it?. *Annual Review of Political Science*, 19(1), 89-105.
- Haidin, S. (2017). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu). *Jurnal Ius*, 5(1).
- Hasan, Zubair. *Economic Functions of an Islamic State: The Early Experience. Leicester: The Islamic Foundation, 1998.*
- Hasanah, A. M. (2020). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 2(2).
- Ibn Khaldun, Abdul Rahman. Muqaddimah. Terjemahan oleh A. Zainal Arifin. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Indonesia, P. R. (2004). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Iqbal, Z., & Lewis, M. K. (2009). An Islamic perspective on governance. In *An Islamic Perspective on Governance*. Edward Elgar Publishing.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. *Jurnal ekonomi dan bisnis*, 19(2), 323-340.
- Kahf, M. (2006). *Islamic Finance: Business as Usual*
- Kahf, Monzer. *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System. Plainfield: The Muslim Students' Association of the US and Canada, 1978.*
- Kbbi, K. B. B. I. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan Dan Budaya.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic economics: theory and practice;(foundations of Islamic economics)*. Westview Press.
- Mannan, M. A. *Islamic Economics: Theory and Practice. New Delhi: Idarah-i-Adabiyat-i-Delli, 1980.*
- Marshall, A. (2013). *Principles of economics*. Springer.
- Mersa, N. A. (2020). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2025 (Studi Kasus Pada Desa

Melintang Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara). *Jurnal Eksis*, 16(2).

Monzer Kahf, \*The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning

Musaid, S. A., Hariyanti, D., Asrida, W., & Hariyati, T. R. (2019). Pengurusan Izin Pangan Industri Rumah Tangga (Pirt) Produk Sagu Tumbu Pada Kelompok Usaha Sagu Tumbu Di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 2(1), 67-80.

Nazir, M. (2005). Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*.

No, U. U. (6). tahun 2014 tentang Desa.

Nopita, R., Wulandari, W., & Suryaningsih, P. E. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK. 07/2021 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BANG HAJI KABUPATEN BENGKULU TENGAH. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 22(1), 93-111.

Nurhadi Hendijani, *Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 32

Pengkajian, P. (2008). Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*.

Rahmawati, Y. (2020). Analisis sintaksis pemerolehan bahasa anak usia 2, 1 tahun. *Jurnal Sastra Indonesia*, 9 (3), 156-164

Rangkuti, R. A. (2024). M. Umer Chapra's Islamic Economic Thought in the Context of Contemporary Era. *Journal of Nusantara Economy*, 3(2), 15-22.

Rozandi, M., & Digdowiseiso, K. (2021). Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat). *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 45-60.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 1996.

Siisiainen, M. (2003). Two concepts of social capital: Bourdieu vs. Putnam. *International journal of contemporary sociology*, 40(2), 183-204.

Soekanto, S. (2009). Peranan sosiologi suatu pengantar. Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

Sukmadinata, N. S. (2019). Metode penelitian pendidikan.

- Umasugi, A. N., Hamizar, A., & Maruapey, M. W. (2024). PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DALAM PERMINTAAN UANG PERNIKAHAN DI DESA LEKOSULA MALUKU UTARA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 651-659.
- VIODELF, M. A. (2024). PELAKSANAAN PENGELOLAAN BANTUAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA).
- Wahyudi, M. Z., Hasanah, N., & Mas'ari, A. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Syariah. *Journal of Sharia and Law*, 2(1), 19-37.
- Widodo, Metodologi Penelitian dan Praktis, cetakan 1, jakarta: rajawali pers, 2017, hlm.72
- Wulandari, T. P. P., & Mubarak, H. (2020). Evaluasi Penerapan Anggaran Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(2), 84-96.
- Yuliani. 2015. Konsep Strategi ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan, *Jurnal (Tulung Agung: STKIP PGRI Tulungagung)*.137
- Yusuf al-Qaradawi, Fiqh Zakat, Terjemahan oleh Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Litera AntarNusa, 2006), 165.
- Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

## LAMPIRAN



Wawancara dengan salah satu Aparat Desa



Wawancara dengan salah satu Saniri Negeri Liang



Wawancara dengan Bendahara Desa Liang



Wawancara dengan tokoh masyarakat





Bahan – Bahan Pembangunan drainase



Pembuatan Drainase



Setelah pemakaian 6 bulan



## INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Indah Sabila Mony

NIM : 210105001

Judul : Analisis Penyaluran Dana Desa Di Negeri Liang Tinjauan  
Ekonomi Islam (Studi Kasus Penyediaan Barang Publik  
Drainase)

Lokasi Penelitian : Desa Liang

No	Pertanyaan	Jawaban	Informan
1.	Apa saja tujuan dan manfaat dari adanya Dana Desa di Desa Liang	Aparat desa :  Masyarakat desa : kalau ditanya tentang manfaat dana desa sudah pasti banyak yah, tapi kita sendiri tuh kurang tau. Tapi ada kok salah satunya itu ada penerimaan bantuan BLT setiap bulannya untuk masyarakat yang membutuhkan, kadang ada yang berupa uang ada juga yang beras juga sama telur gitu.	Aparat Desa Liang dan Masyarakat desa liang
2.	Berapa jumlah dana desa di desa liang per tahun 2024 serta bagaimana tahap penyalurannya	Untuk dana desa per tahun 2024 di desa liang sendiri sebesar Rp 1.786.986.000 dimana dalam 1 tahun ada 2x tahap penyaluran anggaran dari kabupaten yang masuk dalam rekening negeri. Tahapan pertama yaitu sebesar Rp 913.689.600 dan tahapan ke2 yaitu sebesar Rp 873.296.400	Aparat Desa Liang
3.	Apakah semua aparat desa terlibat dalam perencanaan pengelolaan dana desa atau ada tim tersendiri yang dibentuk	Untuk perencanaan sendiri tidak hanya aparat desa, akan tetapi kami mengundang seperti para saniri, ketua rt dan rw, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama dll. perencanaan terdiri dari 4 yaitu tahapan politik (Saniri), tahapan demokrasi yang dilihat secara ilmiah (dengan membedakan apakah ini kebutuhan atau keinginan), tahapan	Aparat Desa Liang

		<p>partisipatif dengan mengumpulkan stakeholder (pemangku kepentingan di negeri) seperti ketua RT, RW, tokoh agama, tokoh Masyarakat dll, dan tahap terakhir yaitu top down dan button up (perencanaan atas dasar pengamatan pimpinan). Semua di bahas di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANG Des) tentang perencanaan dana desa dan akan dipilih skala prioritas oleh stakeholder dan tim sebelas untuk menentukan tentang mana yang lebih urgent dan dilaksanakan terlebih dahulu.</p>	
4	<p>Apakah ada papan informasi kepada Masyarakat mengenai perencanaan yang akan dilaksanakan</p>	<p>Aparat desa : tidak ada. Semua biaya dan semuanya dijelaskan di saat MUSRENBANG Des dilaksanakan.</p> <p>Masyarakat desa : setahu kami yah tidak ada, dulu ada saat kantor desa masih di kantor lama. Sekarang ini 4 tahun terakhir memang tidak ada, mungkin tambah masyarakat banyak juga yang tidak terlalu mengikut hal tersebut jadi juga tidak mencari tahu.</p>	<p>Aparat Desa Liang dan Masyarakat desa liang</p>
5	<p>Pengelolaan dana desa ini lebih di prioritaskan untuk pemberdayaan atau Pembangunan infrastruktur. Bagaimana dengan Pembangunan drainase?</p>	<p>Kalau dilihat dari secara nasional semua ini di atur oleh kementerian desa, semuanya di atur dari sana. Sekian % untuk pemberdayaan, sekian % untuk pembangunan, sekian % untuk gaji semua ( anggaran kerja) seperti posyandu dll. Semuanya mwmang sudah di atur dari sana, kita hanya menyesuaikan.</p> <p>Kalau berbicara drainasse itu sendiri, Pembangunan drainase ini gunakan Masyarakat di sekitar Pembangunan biar 2 aspek langsung jalan. 1 pembangunan infastruktur ke2 pemberdayaan Masyarakat. Biar mereka yang kerja dan mereka juga yang dibayar, kenapa mereka? Karena pembangunan ini di daerah yang pastinya mereka akan buat sebaik mungkin karena mereka yang akan menikmati akan hasilnya.</p>	<p>Aparat Desa Liang</p>

6	Apakah anggaran yang terealisasi sesuai dengan yang telah di anggarakan?	Tidak. Faktanya, anggaran yang di anggarakan kurang karena adanya perubahan pada pembuatannya dan perbedaan harga material dari yang telah di anggarakan.	Aparat Desa Liang															
7	Berapa jumlah anggaran untuk pembuatan drainase?	<p style="text-align: center;"><i>Tabel 1. 5 Rincian Anggaran Belanja (RAB) Pengadaan Drainase</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Anggaran</th> <th>Jumlah Anggaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Biaya Operasional</td> <td>Rp 51.400.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Upah</td> <td>Rp 49.600.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Biaya Tambahan</td> <td>Rp 8.280.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Jumlah</b></td> <td><b>Rp 109.280.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber : Kantor Desa Liang (2025)</p>	No	Jenis Anggaran	Jumlah Anggaran	1	Biaya Operasional	Rp 51.400.000	2	Upah	Rp 49.600.000	3	Biaya Tambahan	Rp 8.280.000		<b>Jumlah</b>	<b>Rp 109.280.000</b>	Aparat Desa Liang
No	Jenis Anggaran	Jumlah Anggaran																
1	Biaya Operasional	Rp 51.400.000																
2	Upah	Rp 49.600.000																
3	Biaya Tambahan	Rp 8.280.000																
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 109.280.000</b>																
8	Mengapa Masyarakat sekitar Pembangunan drainase yang menjadi kuli untuk Pembangunan drainase ini?	Pembangunan drainase ini gunakan Masyarakat di sekitar Pembangunan biar 2 aspek langsung jalan. 1 pembangunan infastruktur ke2 pemberdayaan Masyarakat. Biar mereka yang kerja dan mereka juga yang dibayar, kenapa mereka? Karena pembangunan ini di daerah yang pastinya mereka akan buat sebaik mungkin karena mereka yang akan menikmati akan hasilnya.	Aparat Desa Liang															
9	Apakah ada sosialisasi terkait anggaran yang akan digunakan?	<p>Aparat desa : Tidak ada, dari desa mengharapkan perpanjangan tangan dari para tokoh dan tamu yang di undang dalam MUSRENBANG Des tersebut.</p> <p>Masyarakat desa : untuk sosialisasi kami sendiri pun tidak tahu, tapi saat ada saniri yang survei ke daerah masing-masing, masyarakat pasti akan menguulkan apa yang di inginkan. Hasil survei tersebut yang akan dijadikan list untuk perencanaan pembangunan yang akan dikerjakan</p>	Aparat Desa Liang dan Masyarakat desa liang															
10	Apakah Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan	Pembangunan drainase ini gunakan Masyarakat di sekitar Pembangunan biar 2 aspek langsung jalan. 1 pembangunan infastruktur ke2 pemberdayaan Masyarakat. Biar mereka yang kerja dan mereka juga yang dibayar, kenapa mereka?	Aparat Desa Liang dan Masyarakat desa liang															

	drainase ini?	Karena pembangunan ini di daerah yang pastinya mereka akan buat sebaik mungkin karena mereka yang akan menikmati akan hasilnya.	
11	Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Pembangunan drainase ini?	Tantangan dan kendala ada 2, pertama karena iklim atau cuaca dan yang ke 2 karena ulah manusia. Disana itu karena juga tempat saluran air juga, jadi proses Pembangunan itu terhambat sedikit disitu	Aparat Desa Liang
12	Bagaimana proses pencatatan dari dana desa ini? Pemasukan dan pembukuan?	Untuk laporan pertanggung jawaban sendiri masih sesuai dengan regulasi masih tetap sama, untuk pelaporan di dalam satu tahun tetap menyesuaikan dengan anggaran transfer . anggaran transfer masuk per triwulan berarti pelaporan juga sesuai dengan anggaran transfer yaitu per triwulan. misalkan ADD masuk 1 tahap berarti pelaporan juga sesuai dengan tahapan tersebut. begitupun dengan DD akan tetapi regulasi di dalam pelaporan untuk LPJ, laporan pertanggung jawaban dana desa maupun alokasi dana desa itu ada 2 tahapan, yakni laporan realisasi yang pertama dan laporan realisasi yang ke 2 yaitu lpj	Aparat Desa Liang
13	Apakah ada pihak tertentu untuk memberikan pembinaan terhadap pencatatan ini	Tidak ada	Aparat Desa Liang
14	Siapa saja yang terlibat dalam Menyusun laporan dana desa	Bagian keuangan desa	Aparat Desa Liang

15	Apa saja kendala dalam Menyusun laporan	Terkadang beberapa kendala seperti hasil pencatatan yang ada di papan proyek atau semisalnya yang di ambil dalam bentuk foto dari handphone bisa saja hilang karena terhapus atau handphone yang mengalami gangguan	Aparat Desa Liang
16	Apakah desa memiliki BPD	Tidak ada, tetapi yang biasa mengawasi semua hal tentang ini adalah Saniri.	Aparat Desa Liang
17	Apakah BPD mengawasi pengelolaan dana desa ini?	Yang mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan program kerja desa yang berkaitan dengan dana desa dalam semua hal adalah Saniri	Aparat Desa Liang
18	Bagaimana cara BPD mengawasi pengelolaan dana desa ini?	Pengawasannya dimulai dari proses perencanaan yang dituangkan dalam musyawarah desa, kemudian proses pelaksanaan yang dilakukan oleh desa sampai dengan proses pelaporan pertanggungjawaban pemerintah negeri selama kegiatan pembangunan	Aparat Desa Liang
19	Bagaimana tanggapan bapak ibu tentang Pembangunan drainase ini?	<p>Masyarakat 1 : Desa perbaiki selokan itu bagus sih, kalau tidak pas hujan tuh kita pada gabisa keluar karena selokan awalnya tuh kan pendek, kadang sampah sisa jajan bocil tuh dibuang ke selokan pas hujan airnya ga ngalir jadi meluap semua isi selokannya ke jalan.</p> <p>Masyarakat 2 : Dengan diperbaiki selokan itu bagus sih, soalnya kalau hujan pengaruh selokannya yang rendah itu airnya jadi keluar meluap ke jalan juga. Hasilnya jalannya jadi ikut tergenang dan keringnya tuh lama banget, jadinya jalan di sekitar sini banyak yang rusak pengaruh sering tergenangnya air yang meluap akibat rendahnya selokan.</p> <p>Masyarakat 3 : Waktu selokan awal tuh aliran airnya gabaik yah, salah satu masalahnya itu air yang tergenang di dalamnya jadi sarang nyamuk. Hasilnya kalau hujan tuh banyak banget nyamuknya,</p>	Aparat Desa Liang dan Masyarakat desa liang

		takut aja anak-anak pada kena malaria nanti. Tapi alhamdulillah deh sudah diperbaiki.	
--	--	---	--



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jl. Imam Bonjol. E-mail : maltengkesbangpol@gmail.com

M A S O H I

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 074/29/BKBP/1/2025

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);  
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;  
5. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;  
6. Surat Gubernur Maluku Nomor 220/375 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP);
- B. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Nomor : B-14/In.09/7/3.b/PP.07/2025  
21 Januari 2025  
Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :

- a. Nama : **Indah Sabilah Mony**  
b. Identitas : Mahasiswa Program Studi. Ekonomi Syariah  
c. N I M : 210105001  
d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :  
**"Analisis Peran Alokasi Dana Pemerintah di Negeri Liang Ekonomi Islam ( Studi Kasus Penyediaan Barang Publik Jembatan/Jalan)".**  
2. Lokasi Penelitian : Negeri Liang  
Kecamatan Salahutu  
Kabupaten Maluku Tengah  
3. Waktu Penelitian : 27 Januari 2025 s/d 27 Februari 2025

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.  
b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan.  
c. Surat Keterangan ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian  
d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian  
e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.  
f. Memperhatikan dan mentaati system kerja instansi setempat.  
g. Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan hasil kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.  
h. Apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut maka Surat Keterangan ini akan dicabut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Masohi, 24 Januari 2025

Kepala Badan,  
  
**S. J. NOYA, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700214 199003 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH  
KECAMATAN SALAHUTU  
NEGERI LIANG

Alamat : Jalan Raya Liang Km 39 Kode Pos 97582

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN  
NOMOR : 140/163 /KET-PNL/II/2025

Kepala Pemerintah Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **INDAH SABILA MONY**  
NIM : 210105001  
Asal Lembaga : IAIN Ambon  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Judul Skripsi : *"Analisis Peran Alokasi Dana Pemerintah di Negeri Liang  
Ekonomi Islam (Studi Kasus Penyediaan Barang Publik  
Jembatan/Jalan)"*  
Lokasi Penelitian : Negeri Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah

Bahwa nama tersebut di atas benar-benar telah melakukan Penelitian di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dari tanggal 27 Januari 2025 s/d tanggal 27 Februari 2025 dan yang bersangkutan telah melaporkan akhir dari Penelitian kepada Pemerintah Negeri Liang.

Olehnya itu atas nama Pemerintah Negeri Liang kami menyatakan bahwa **INDAH SABILAH MONY** selama melakukan Penelitian di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan sikap perilaku yang baik dan telah selesai melakukan penelitiannya.

Demikian Surat Keterangan selesai Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Liang, 28 Februari 2025  
a.n Kepala Pemerintah  
Negeri Liang  
SEKERTARIS

  
M. M REFHALAT, S.Sos